



BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

QUALITY ASSURANCE TERHADAP APIP DALAM RANGKA PENCEGAHAN PRAKTEK PUNGUTAN LIAR (PUNGLI)

Dr. Ardan Adiperdana, Ak., MBA., CA, CFrA, QIA
Kepala BPKP

**WORKSHOP PERAN APIP DALAM PENCEGAHAN PRAKTEK PUNGUTAN LIAR (PUNGLI)
JAKARTA, 12 JANUARI 2017**

Dasar Hukum



1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
2. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar
3. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemberantasan Praktek Pungutan Liar (Pungli) dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Instansi Pemerintah
4. Instruksi Mendagri No 180/3935/SJ tanggal 24 Oktober 2016 tentang Pengawasan Pungutan Liar Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Khusus untuk Pemerintah Daerah).

PERPRES NO 87/2016

Optimalisasi Sumber Daya K/L/P untuk berantas Pungli

SE MenPAN & RB Nomor 5 Tahun 2016

K/L/D

BPKP

1. Koordinasi dan sinergi
2. *Quality Assurance*

Unit Kerja/SKPD

Mengidentifikasi area yang berpotensi pungli dan mengambil langkah-langkah yang efektif untuk memberantas pungli

APIP

Mendorong dan memantau langkah-langkah unit kerja/SKPD dalam mencegah dan mendeteksi pungli

INSTRUKSI MENDAGRI NOMOR 180/2016

- Binwas Penyelenggaraan Pemda yang mempunyai risiko terjadinya pungli
- Perijinan, Hibah dan Bansos, Kepegawaian, Pendidikan, Dana Desa, Pelayanan Publik, PBJ, Kegiatan lain berisiko penyimpangan

PP Nomor 60 Tahun 2008 Tentang SPIP



SPIP

Tanggung Jawab
Pimpinan K/L/Pemda



Tujuan

1. kegiatan yang efektif dan efisien;
2. keandalan pelaporan keuangan;
3. pengamanan aset negara;
4. ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Unsur

1. Lingkungan Pengendalian
2. Penilaian Risiko
3. Kegiatan Pengendalian
4. Informasi dan Komunikasi
5. Pemantauan Pengendalian

APIP: memperkuat dan menunjang
efektivitas SPIP

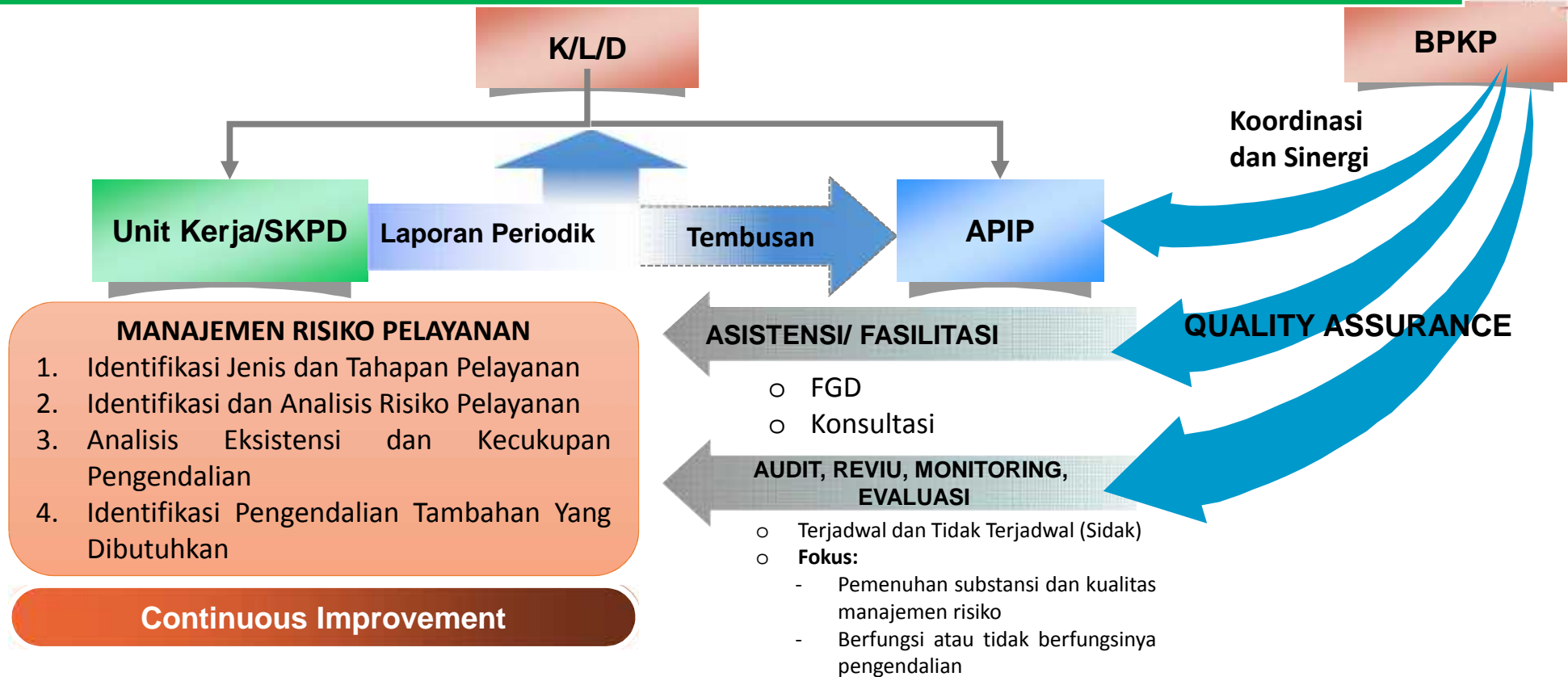
Pengawasan Intern

BPKP Membina Penyelenggaraan SPIP

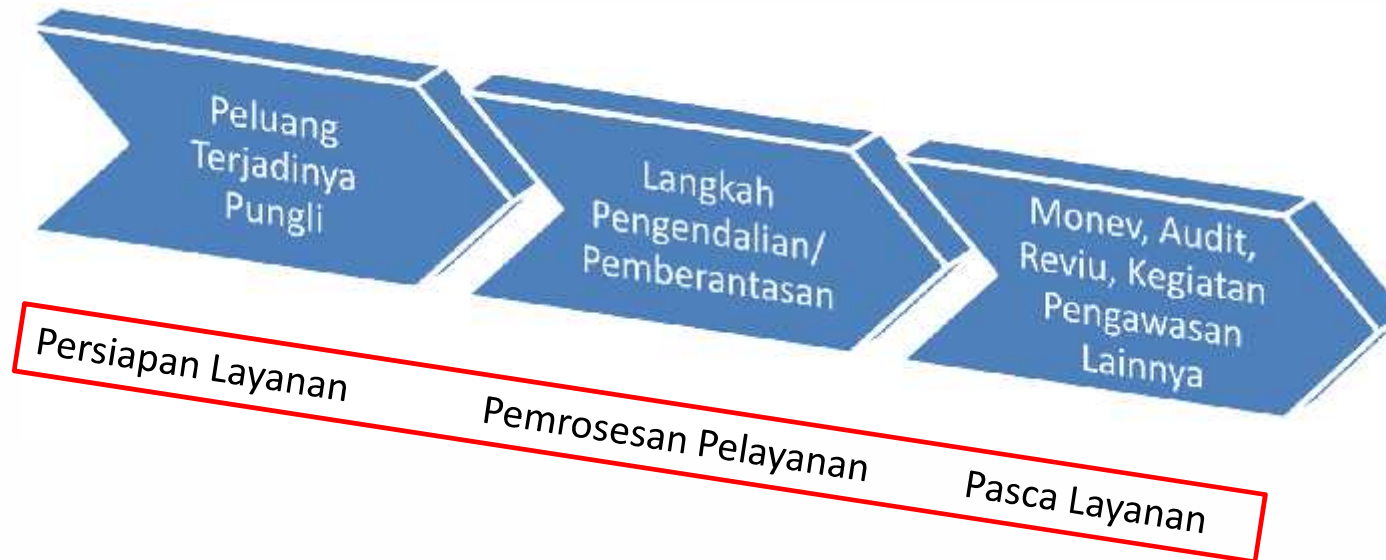
APIP yang Efektif

1. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah;
2. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas **manajemen risiko** dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah; dan
3. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.

DESIGN PENCEGAHAN PRAKTIK PUNGUTAN LIAR (PUNGLI)



Koordinasi dan Sinergi : Pedoman Bagi APIP dalam Pengendalian Terkait Pungli



Persiapan Layanan

No	Peluang Terjadinya Pungli	Langkah Pengendalian /Pemberantasan oleh Unit Kerja Layanan Publik	Tindakan APIP	
			Preventif	Deteksi
1	Permohonan layanan tidak mengetahui informasi persyaratan, jenis layanan, alur proses, waktu tempat dan biaya	Pajang maklumat layanan, online dan offline, berisi hak dan kewajiban pemohon dan pemberi layanan, dan sediakan Layanan Informasi Hotline	Profil pelayanan, daftar dan analisis resiko	Wawancara dan konfirmasi
2	Pemohon dilayani oleh petugas yang tidak berwenang	Cek setiap saat seluruh petugas memiliki ID Card, peran, Surat Tugas, dan disupervisi	Pemantauan (observasi)	Inspeksi mendadak (sidak)
3	Calo/perantara/biro jasa lebih diprioritaskan dibandingkan pemohon pribadi	Berikan nomor antrian, buat <i>tracking system</i> , barcode melalui sistem yang terkomputerisasi	Pemantauan (observasi)	Inspeksi mendadak (sidak)

Pemrosesan Pelayanan (1)

No	Peluang Terjadinya Pungli	Langkah Pengendalian/Pemberantasan oleh Unit Kerja Layanan Publik	Tindakan APIP	
			Preventif	Deteksi
1	Pemohon tidak mendapatkan bukti pemenuhan persyaratan	Buat dan terapkan <i>Tracking System</i>	Telaah kebijakan dan pemantauan (observasi)	Inspeksi mendadak (sidak)
2	Pemohon dapat mengintervensi proses layanan (bertatap muka dengan petugas layanan)	Buat sistem yang terkomputerisasi, lay out ruangan yang membatasi akses orang yang tidak berhak, arahkan CCTV ke area pemrosesan layanan	Telaah kebijakan dan pemantauan (observasi)	Inspeksi mendadak (sidak)
3	Pemohonan diminta uang oleh petugas layanan diluar sistem	Umumkan kepada pengguna layanan untuk dilakukan <i>whistle blowing</i>	Pemantauan (observasi), kotak pengaduan, dan questioner pelayanan publik	Inspeksi mendadak (sidak)

Pemrosesan Pelayanan (2)

No	Peluang Terjadinya Pungli	Langkah Pengendalian /Pemberantasan oleh Unit Kerja Layanan Publik	Tindakan APIP	
			Preventif	Deteksi
4	Pemohon tidak mengetahui progress pemrosesan layanan	Arahkan CCTV ke area pemrosesan layanan, buat <i>Routing Slip</i> (pre-number form, barcode), dan kembangkan sistem yang terkomputerisasi	Telaah kebijakan dan pemantauan (observasi)	Analisis dokumen dan aplikasi serta wawancara
5	Pemohon diminta membayar melebihi dari tarif resmi	Buat sistem pembayaran melalui bank persepsi, atau penggunaan e-money	Telaah kebijakan, pemantauan (observasi), kotak pengaduan, dan questioner pelayanan publik	Analisis dokumen dan aplikasi, wawancara serta Inspeksi mendadak (sidak)
6	Petugas layanan sulit tertangkap basah melakukan pungli	Laksanakan Mystery Shopping	Daftar dan analisis resiko, Telaah kebijakan, pemantauan (observasi), kotak pengaduan, dan questioner pelayanan publik	Analisis dokumen dan aplikasi, konfirmasi serta inspeksi mendadak

Pemrosesan Pelayanan (3)



No	Peluang Terjadinya Pungli	Langkah Pengendalian/Pemberantasan oleh Unit Kerja Layanan Publik	Tindakan APIP	
			Preventif	Deteksi
7	Petugas layanan tertangkap melakukan pungli	Proses dan laporan kepada Saber Pungli	Daftar dan analisis resiko, Telaah kebijakan, pemantauan (observasi), kotak pengaduan, dan questionere pelayanan publik	Analisis dokumen dan aplikasi, konfirmasi serta Inspeksi mendadak (sidak)
8	Petugas tidak menghadapi risiko sanksi sosial	Pampangkan papan pengumuman petugas pelayanan pemungut liar	Telaah kebijakan dan atensi kepada pimpinan	Wawancara, konfirmasi dan inspeksi mendadak
9	Petugas merasa tidak mendapatkan imbalan yang sesuai atas kinerjanya	Pampangkan papan pengumuman employee of the month, kembangkan reward system seperti pembagian insentif atas pencapaian PNPB bagi petugas layanan.	Telaah kebijakan dan atensi kepada pimpinan	Analisis dokumen dan aplikasi, serta wawancara
10	Pemohonan layanan mendapatkan penilaian yang tidak obyektif	Selenggarakan Computer Assisted Test (CAT), ekspose hasil penilaian, selenggarakan quality assurance /supervisi, dapatkan SNI pelayanan, syaratkan petugas layanan bersertifikat	Daftar dan analisis resiko, Telaah kebijakan, pemantauan (observasi), kotak pengaduan, dan questioner pelayanan publik	Analisis dokumen dan aplikasi serta konfirmasi

PASCA LAYANAN

No	Peluang Terjadinya Pungli	Langkah Pengendalian/Pemberantasan oleh Unit Kerja Layanan Publik	Tindakan APIP	
			Preventif	Deteksi
1	Pengaduan kurang mendapat respon	Dorong dilakukan whistle blowing	Telaah kebijakan, pemantauan (observasi) dan atensi kepada pimpinan	Analisis dokumen dan aplikasi serta wawancara
2	Adanya kekhawatiran dalam melakukan whistle blowing	Adakan perlindungan bagi whistle blower yang menyampaikan informasi melalui media publik, terutama sosial media, dari tuduhan pelanggaran eksploitasi UU ITE dan pasal pencemaran nama baik	Telaah kebijakan, kotak pengaduan, questioner pelayanan publik, pemantauan (observasi) dan atensi kepada pimpinan	Analisis dokumen dan aplikasi serta wawancara

QUALITY ASSURANCE

TUJUAN QA

Memberikan jaminan terhadap kualitas pelaksanaan kegiatan pengawasan intern APIP dalam mendorong dan memantau langkah-langkah unit kerja/SKPD dalam mencegah dan mendeteksi pungli

Perencanaan

Memastikan APIP sudah memiliki rencana dalam mencegah dan mendeteksi pungli

Pelaksanaan

Memastikan bahwa program pengawasan dalam mencegah dan mendeteksi pungli dilakukan sesuai sasaran, waktu, dan rencana yang ditetapkan

Hasil

Memastikan bahwa hasil pengawasan memiliki dampak dalam mencegah dan mendeteksi pungli serta memastikan pungli yang ditemukan ditangani sesuai aturan yang berlaku

Teknis Pelaksanaan QA:
Dikoordinasikan Lebih Lanjut oleh BPKP dan APIP



“Jangankan puluhan atau ratusan juta,

**urusan Rp10 ribu
juga akan saya urus,**

ini kan kecil-kecil tapi menjengkelkan,”

Presiden Joko Widodo

16 Oktober 2016

Terima Kasih